

Optimalisasi Implementasi SIPD Melalui Klinik Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Pendekatan Kualitatif Di Kabupaten Tojo Una-Una

Nasrun Naida

Badan Pngelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tojo Una-Una. Sulawesi Tengah Indonesia

Email: nasrunnaida79@gmail.com

Article History : Received: 19-09-2025 Accepted: 28-09-2025 Publication: 30-09-2025

Abstract: *This study aims to identify the main obstacles in the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the Accounting and Reporting (Aklap) module and analyze its impact on the quality of the Regional Government Financial Report (LKPD). A qualitative approach with a case study design was used, located in Tojo Una-Una Regency. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies, and analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the implementation of SIPD still faces obstacles, particularly limited technical competence of human resources, system disruptions, and a lack of ICT infrastructure. The Accounting Clinic plays a strategic role in bridging technical and conceptual gaps through consultation and training, which contributes to improving the quality of the LKPD, as reflected in the BPK's WTP opinion for 13 consecutive years. This study confirms that the Accounting Clinic is an effective institutional innovation in strengthening technical capacity and regional financial accountability. Sustainable institutionalization of the Accounting Clinic is needed through budget strengthening, human resource capacity building, and the development of contextual needs-based training.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan utama dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, berlokasi di Kabupaten Tojo Una-Una. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan kompetensi teknis SDM, gangguan sistem, dan kurangnya infrastruktur TIK. Klinik Akuntansi berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan teknis dan konseptual melalui konsultasi dan pelatihan, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas LKPD, tercermin dari opini WTP BPK selama 13 tahun berturut-turut. Penelitian ini menegaskan bahwa Klinik Akuntansi merupakan inovasi kelembagaan efektif dalam memperkuat kapasitas teknis dan akuntabilitas keuangan daerah. Diperlukan institusionalisasi Klinik Akuntansi secara berkelanjutan melalui penguatan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan pelatihan berbasis kebutuhan kontekstual

Keywords : SIPD; Accounting Clinic; LKPD

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara mulai digulirkan sejak tahun 2003, yang ditandai dengan lahirnya tiga undang-undang utama di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Negara, 2003), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (R. Indonesia, 2004b), serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (R. Indonesia, 2004c) Ketiga regulasi ini menjadi fondasi bagi pergeseran paradigma dari administrasi keuangan yang bersifat konvensional menuju pengelolaan keuangan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan praktik terbaik bertaraf internasional (*international best practices*) (Illahi & Haykal, 2021).

Seiring berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Suprapti Widasih, 2025; Suriadi, 2025; Sutrisna & Setiawati, 2023). Dalam konteks ini, akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi secara terbuka kepada publik (Mardiasmo, 2021; Silvia et al., 2023; Swasanany, 2019; Yanuarisa & Irianto, 2014). Untuk menjawab tuntutan tersebut, lahirilah berbagai regulasi pendukung, di antaranya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (R. Indonesia, 2004a) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (R. Indonesia, 2014), yang memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (P. R. Indonesia, 2010; R. Indonesia, 2010). Standar Akuntansi Pemerintahan berperan sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, relevan, dan andal. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kemudian menjadi tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memberikan opini audit atas kewajaran laporan tersebut.

Namun, di lapangan, banyak daerah masih mengalami kendala dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti keterbatasan pemahaman teknis aparatur, kurangnya pelatihan, serta pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, muncul inovasi berupa Klinik Akuntansi, sebuah sarana konsultatif dan edukatif yang ditujukan untuk membantu bendahara dan pengelola keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan secara tepat dan sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu daerah yang mencoba mengoptimalkan kualitas laporan keuangannya melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi dengan pendampingan dari Klinik Akuntansi Pemerintah Daerah. Sejak tahun anggaran 2022, modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) dalam SIPD mulai diterapkan untuk mendorong efisiensi dan konsistensi dalam proses pelaporan keuangan berbasis akrual. Klinik Akuntansi dibentuk sebagai bagian dari inovasi Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memperkuat kompetensi teknis SDM, menyediakan konsultasi, pelatihan, serta menjadi perantara dalam menyosialisasikan kebijakan keuangan terbaru. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan SIPD dan fungsi Klinik Akuntansi masih menemui sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kapasitas SDM dalam menggunakan sistem digital, kurangnya pelatihan teknis, serta kendala sistemik seperti keterlambatan pembaruan atau gangguan pada platform SIPD.

Masih adanya OPD yang menggunakan metode manual menunjukkan bahwa implementasi SIPD belum sepenuhnya optimal. Hambatan ini tidak hanya mempengaruhi efektivitas pelaporan, tetapi juga berdampak pada kualitas LKPD yang menjadi objek penilaian BPK. Oleh karena itu, upaya untuk memahami bagaimana peran Klinik Akuntansi mendukung penerapan SIPD secara nyata dan kontekstual di lingkungan OPD menjadi penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam proses, tantangan, dan dampak dari keberadaan Klinik Akuntansi terhadap implementasi SIPD serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman subjektif para aktor di lapangan, seperti pegawai BPKAD, bendahara OPD, dan pihak terkait lainnya, untuk memahami secara kontekstual bagaimana sinergi antara SIPD dan Klinik Akuntansi mempengaruhi praktik penyusunan laporan keuangan.

Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi, pemerintah telah mengembangkan dan menerapkan SIPD. Namun demikian, implementasi sistem ini, khususnya pada modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), masih menemui berbagai tantangan teknis dan non-teknis di tingkat daerah. Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu daerah yang tengah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah, namun dalam praktiknya, proses ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang bersumber dari kapasitas SDM, infrastruktur pendukung, maupun pemahaman atas sistem itu sendiri.

Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, hadirnya Klinik Akuntansi sebagai wadah pendampingan teknis bagi OPD diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penggunaan SIPD. Pendampingan ini tidak hanya berperan dalam aspek teknis, tetapi juga dalam peningkatan pemahaman konseptual aparatur terhadap sistem dan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, efektivitas peran Klinik Akuntansi masih perlu ditelaah secara lebih mendalam untuk menilai

Cite this article as :

Naida, N. . Optimalisasi Implementasi SIPD Melalui Klinik Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Pendekatan Kualitatif Di Kabupaten Tojo Una-Una. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(2), 100–111. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i2.396>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

sejauh mana kontribusinya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, antara lain: apa saja kendala utama yang dihadapi dalam implementasi SIPD pada modul Aklap di Kabupaten Tojo Una-Una; bagaimana peran Klinik Akuntansi dalam mendampingi OPD untuk mengatasi hambatan teknis serta meningkatkan pemahaman penggunaan SIPD; sejauh mana pemanfaatan Klinik Akuntansi berdampak pada peningkatan kualitas LKPD; serta strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dan Klinik Akuntansi dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pendampingan teknis serta tantangan implementasi kebijakan digitalisasi keuangan di daerah. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan SIPD, mendeskripsikan peran Klinik Akuntansi dalam memberikan dukungan teknis kepada OPD, menganalisis pengaruh keberadaan Klinik Akuntansi terhadap kualitas LKPD, serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna mengoptimalkan pemanfaatan SIPD dan Klinik Akuntansi dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

METODE

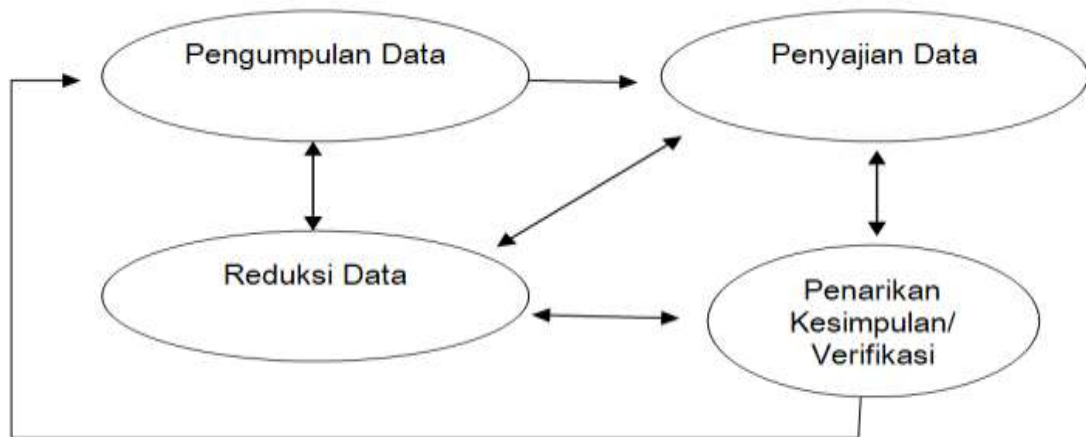
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Sigit Hermawan & Amirullah, 2021). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika dan realitas empiris yang kompleks terkait implementasi SIPD melalui intervensi Klinik Akuntansi di Kabupaten Tojo Una-Una. Studi kasus difokuskan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami proses, hambatan, dan dampak dari kebijakan dan praktik digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta beberapa OPD yang menjadi sampel atau pengguna aktif Klinik Akuntansi. Pemilihan lokasi ini bersifat *purposive*, dengan pertimbangan bahwa daerah ini telah mengimplementasikan modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) dalam SIPD dan membentuk Klinik Akuntansi sebagai inovasi pendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Subjek penelitian terdiri dari: Pejabat dan staf teknis di BPKAD (khususnya di Bidang Akuntansi) dan Bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) di OPD. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* dan *snowball sampling*, dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif mereka dalam proses pendampingan dan pelaporan keuangan berbasis SIPD.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) untuk menggali pandangan (Adityara & Rakhman, 2019; Tallane & Kusuma, 2020), pengalaman, dan pemahaman para informan mengenai implementasi SIPD dan peran Klinik Akuntansi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menjaga fleksibilitas penggalian informasi. Observasi partisipatif terhadap pelaksanaan kegiatan klinik akuntansi, interaksi antara fasilitator dan OPD, serta penggunaan SIPD dalam proses pelaporan keuangan (Mustanir et al., 2019; Musyafa et al., 2025). Observasi ini bersifat langsung dan dilakukan di lingkungan kerja OPD dan BPKAD. Studi Dokumentasi meliputi pedoman teknis penggunaan SIPD, laporan keuangan (LKPD), notulen kegiatan Klinik Akuntansi, dokumen pelatihan, serta hasil audit dari BPK. Studi dokumentasi bertujuan untuk memperoleh bukti pendukung yang objektif terhadap pernyataan informan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles et al., 1992). Model ini terdiri dari tiga komponen utama yang berlangsung secara simultan dan interaktif meliputi reduksi data (*data reduction*) yang mencakup pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang bermakna. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, sejak data dikumpulkan hingga disusun menjadi temuan awal. Penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi, matriks, tabel, dan grafik untuk memudahkan interpretasi. Penyajian data ini berfungsi untuk melihat pola, hubungan antar variabel, serta mengorganisasi informasi agar dapat ditarik kesimpulan yang logis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) yaitu kesimpulan awal yang ditarik selama proses pengumpulan data terus diuji dan diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber informasi (*triangulasi*), baik dari wawancara, observasi, maupun dokumen (Aceituna et al., 2014; Seymour, 2012). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data (validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif), digunakan teknik *triangulasi* sumber, metode, dan waktu. Validitas diperkuat dengan melakukan member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan guna memastikan kebenaran data. Selain itu, peer debriefing dilakukan dengan berdiskusi bersama kolega atau ahli dalam bidang keuangan daerah untuk memperoleh masukan kritis atas temuan sementara..



Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi SIPD pada modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) serta peran Klinik Akuntansi dalam mendukung peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Tojo Una-Una. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan realitas empiris dengan literatur dan kerangka konsep yang menjadi landasan penelitian.

Kendala Implementasi Modul Aklap dalam SIPD

Implementasi modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Tojo Una-Una tidak terlepas dari berbagai hambatan yang muncul baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pelaporan keuangan daerah secara digital, kenyataannya banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengoperasiannya.

Pertama Kompetensi SDM yang Belum Merata. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah ketimpangan kompetensi teknis aparatur dalam memahami dan mengoperasikan modul Aklap SIPD. Beberapa bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan di OPD mengaku masih kesulitan dalam melakukan pencatatan transaksi berbasis akrual, menyusun jurnal penyesuaian, hingga melakukan verifikasi akhir laporan. Pelatihan yang telah diberikan sebelumnya dianggap belum cukup membekali mereka dengan kemampuan praktis yang memadai, terutama dalam menghadapi kasus-kasus transaksi kompleks atau penyesuaian akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM tidak bisa berhenti pada pelatihan awal, melainkan memerlukan pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual sesuai kebutuhan lapangan.

Kedua Gangguan Sistem dan Integrasi Data. Selain kendala dari sisi SDM, persoalan teknis pada sistem SIPD juga menjadi hambatan yang cukup dominan. Hasil observasi menunjukkan bahwa saat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna, sistem sering kali mengalami keterlambatan (lag), bahkan tidak merespons dalam waktu lama. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran proses input data, tetapi juga menurunkan motivasi pengguna dalam memanfaatkan sistem secara konsisten. Studi dokumentasi memperkuat temuan ini, di mana proses integrasi antara modul penatausahaan dan modul akuntansi belum sepenuhnya berjalan otomatis, sehingga sejumlah data harus diinput ulang secara manual. Praktik ini tentu tidak efisien dan rawan menimbulkan kesalahan, terutama bila dilakukan oleh SDM yang belum memiliki pemahaman akuntansi yang kuat.

Ketiga Infrastruktur Teknologi Informasi yang Tidak Merata. Faktor pendukung seperti infrastruktur teknologi informasi (TI) juga menjadi tantangan nyata, terutama bagi OPD yang berada di wilayah kecamatan atau daerah dengan keterbatasan akses jaringan. Koneksi internet yang tidak stabil menjadi hambatan dalam menjalankan aplikasi SIPD secara optimal. Beberapa OPD bahkan melaporkan harus menunda proses input karena sistem tidak dapat dibuka atau data tidak tersimpan dengan baik. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan akses dan kapasitas TI antar OPD, yang jika tidak segera diatasi, berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kualitas pelaporan keuangan antar unit kerja di dalam satu pemerintah daerah.

Peran Klinik Akuntansi sebagai Pendamping Teknis

Kehadiran Klinik Akuntansi di Kabupaten Tojo Una-Una tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan implementasi SIPD, tetapi juga menjelma sebagai bentuk inovasi kelembagaan dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Klinik ini berfungsi sebagai simpul penghubung antara kompleksitas sistem informasi dengan kapasitas teknis sumber daya manusia di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peran Klinik Akuntansi dapat dilihat dari tiga aspek utama, yakni konsultasi teknis, pelatihan berbasis konteks, dan diseminasi kebijakan terbaru.

Pertama konsultasi Harian dan Layanan Bantuan Teknis. Salah satu keunggulan Klinik Akuntansi adalah kemampuannya memberikan layanan konsultasi secara fleksibel, baik melalui tatap muka langsung maupun platform daring. Fungsionalitas ini menjadi sangat krusial mengingat karakteristik pekerjaan bendahara dan petugas keuangan yang kerap bersinggungan dengan kendala teknis mendadak. Berdasarkan pengakuan beberapa informan dari OPD, mayoritas permasalahan input data atau kesalahan sistem dapat ditangani dalam waktu satu hingga dua hari sejak pelaporan. Proses konsultasi yang cepat dan responsif ini tidak hanya mempercepat pemecahan masalah teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem SIPD itu sendiri.

Kedua pelatihan Kontekstual dan Modular. Selain fungsi konsultasi, Klinik Akuntansi juga berperan dalam pengembangan kapasitas teknis aparatur melalui pelatihan modular yang disusun berdasarkan kebutuhan riil lapangan. Materi pelatihan disusun secara tematik, misalnya tentang penyusunan jurnal penyesuaian, teknik verifikasi transaksi, atau langkah-langkah rekonsiliasi data keuangan. Uniknya, pendekatan pelatihan yang dilakukan berbasis kasus-kasus aktual yang dihadapi OPD, sehingga substansi pelatihan terasa lebih kontekstual dan mudah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan metode ini, Klinik tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan analitis dan problem solving aparatur keuangan secara sistematis.

Ketiga sosialisasi Kebijakan dan Pembaruan Sistem. Fungsi penting lain dari Klinik Akuntansi adalah sebagai agen diseminasi kebijakan dan pembaruan sistem informasi keuangan. Di tengah perubahan regulasi yang dinamis, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Klinik mengambil peran sebagai jembatan informasi antara otoritas pusat dan pelaksana teknis di daerah. Melalui forum-forum diskusi, sosialisasi terjadwal, dan penyebaran materi pembaruan, Klinik memastikan bahwa OPD senantiasa mengikuti perkembangan standar akuntansi pemerintah yang terbaru. Hal ini sangat penting agar pelaporan keuangan yang dihasilkan tetap relevan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Implementasi Klinik Akuntansi di Kabupaten Tojo Una-Una membawa dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui pendekatan pendampingan teknis dan pelatihan kontekstual, Klinik tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsultasi, tetapi juga sebagai katalisator perubahan dalam tata kelola keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak positif Klinik Akuntansi tercermin pada tiga aspek utama: ketepatan waktu pelaporan, kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan peningkatan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pertama Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Laporan. Salah satu indikator awal keberhasilan intervensi Klinik Akuntansi adalah meningkatnya kepatuhan terhadap tenggat waktu penyusunan dan pelaporan keuangan. Berdasarkan data dokumentasi internal BPKAD, terdapat peningkatan sebesar 15–20% dalam tingkat penyelesaian rekonsiliasi realisasi APBD dan Laporan Keuangan di OPD mitra Klinik jika dibandingkan dengan periode sebelum pendampingan intensif dilakukan. Kedisiplinan ini tidak hanya berpengaruh pada ketepatan waktu penyusunan laporan, tetapi juga berdampak pada keselarasan antara proses pelaporan di OPD dengan siklus tahapan pelaporan tahunan pemerintah daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa intervensi Klinik mampu mendorong efisiensi administratif sekaligus memperkuat budaya kerja yang lebih terstruktur dan terjadwal.

Kedua Kepatuhan terhadap SAP dan Akuntansi Akrua. Dampak lainnya yang cukup menonjol adalah meningkatnya pemahaman dan keterampilan teknis aparatur dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Melalui akses rutin terhadap modul pelatihan dan sesi konsultasi yang difasilitasi oleh Klinik, para bendahara dan pejabat penatausahaan keuangan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan pencatatan akuntansi sesuai SAP. Hal ini terlihat, misalnya, dari ketepatan dalam penyusunan jurnal penyesuaian akhir tahun, proses rekonsiliasi kas dan aset, hingga pelaporan kewajiban dan utang jangka pendek. Peningkatan ini mencerminkan proses pembelajaran yang berkesinambungan dan efektif dalam menginternalisasi prinsip akuntansi pemerintahan secara praktis.

Ketiga Peningkatan kualitas LKPD sebagai hasil dari pendampingan Klinik Akuntansi tidak hanya tercermin dalam perbaikan teknis pelaporan, tetapi juga dalam keberhasilan mempertahankan opini audit tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini merupakan pencapaian yang sangat signifikan dan menunjukkan konsistensi tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini memperkuat dugaan bahwa keberadaan Klinik Akuntansi berperan penting sebagai faktor pendorong utama dalam reformasi keuangan daerah. Melalui layanan konsultasi yang responsif, pelatihan yang kontekstual, serta penyebaran informasi kebijakan yang adaptif, Klinik telah membantu membangun budaya kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi pemerintahan.

Pendekatan Klinik Akuntansi sebagai sarana pendampingan tidak hanya bersifat teknis-instruksional, tetapi lebih luas mencakup dimensi penguatan kapasitas yang sesuai dengan konsep capacity building. Klinik menjadi ruang belajar kontekstual yang memungkinkan aparatur mengembangkan kompetensi berbasis pengalaman nyata, sekaligus membangun kepercayaan diri dalam menggunakan sistem secara mandiri. Hal ini sejalan dengan gagasan Werther dan Davis (1996) yang menempatkan SDM sebagai aset strategis organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengembangan kapasitas SDM bukan hanya ditujukan untuk memenuhi standar administratif, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel.

Lebih lanjut, kontribusi Klinik Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) juga dapat dianalisis dalam kerangka teori karakteristik laporan keuangan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan konsep dasar GASB. Karakteristik seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan dapat dipahami menjadi standar ideal yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan sektor publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang

diberikan oleh Klinik Akuntansi secara nyata membantu pemenuhan karakteristik tersebut, khususnya dalam meningkatkan kualitas penyusunan jurnal akuntansi, rekonsiliasi data, dan penyajian laporan keuangan yang kini lebih sistematis dan konsisten dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan utama yang memiliki implikasi praktis bagi penguatan tata kelola keuangan daerah. Pertama, keterbatasan SDM dalam penggunaan SIPD menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan yang dirancang secara kontekstual dan berkelanjutan. Kedua, kendala sistem dan integrasi data mengindikasikan kebutuhan mendesak akan peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan optimalisasi sistem SIPD agar dapat berfungsi lebih efisien. Ketiga, efektivitas layanan konsultatif yang diberikan oleh Klinik Akuntansi menjadi argumen kuat untuk memperkuat kelembagaan klinik, baik dari sisi ketersediaan tenaga ahli maupun dukungan anggaran. Terakhir, peningkatan opini audit dari BPK menjadi indikator bahwa intervensi melalui Klinik Akuntansi tidak hanya berpengaruh pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian akuntabilitas fiskal yang lebih tinggi..

KESIMPULAN

Implementasi modul Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Kendala utama meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi berbasis akrual, gangguan sistem yang menghambat proses input dan integrasi data, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh OPD. Dalam menghadapi hambatan tersebut, keberadaan Klinik Akuntansi terbukti memiliki peran signifikan sebagai pendamping teknis. Klinik tidak hanya menyediakan layanan konsultasi harian dan pelatihan modular, tetapi juga berperan sebagai fasilitator penyebaran informasi kebijakan dan pembaruan sistem. Pendampingan yang dilakukan mampu menjawab gap kompetensi pengguna, memperkuat kapasitas teknis aparatur, serta meningkatkan pemahaman terhadap prinsip akuntansi pemerintahan. Dampak positif dari intervensi Klinik Akuntansi tercermin pada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan data, maupun kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Secara konkret, peningkatan kualitas LKPD juga ditandai dengan opini WTP atas audit BPK yang berhasil dipertahankan selama 13 tahun berturut-turut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Klinik Akuntansi merupakan model pendampingan teknis yang efektif dalam mendukung implementasi SIPD, serta berkontribusi langsung terhadap penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Temuan ini sekaligus mengindikasikan pentingnya pelemagaan klinik sebagai bagian dari strategi reformasi kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah..

Cite this article as :

Naida, N. . Optimalisasi Implementasi SIPD Melalui Klinik Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Pendekatan Kualitatif Di Kabupaten Tojo Una-Una. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(2), 100–111. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i2.396>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

DAFTAR PUSTAKA

- Aceituna, D., Walia, G., Do, H., & Lee, S.-W. (2014). Model-based requirements verification method: Conclusions from two controlled experiments. *Information and Software Technology*, 56(3), 321–334.
- Adityara, S., & Rakhman, R. T. (2019). Karakteristik generasi Z dalam perkembangan diri anak melalui visual. *Seminar Nasional Seni Dan Desain 2019*, 401–406.
- Illahi, B. K., & Haykal, H. (2021). Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 1.
- Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (2004a). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. In *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indonesia, R. (2004b). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. In *Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun*.
- Indonesia, R. (2004c). *Undang-Undang RI nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Cipta Jaya.
- Indonesia, R. (2010). Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Peraturan Pemerintah (Vol. 71)*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2019). Pemberdayaan kelompok masyarakat desa dalam perencanaan metode partisipatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 227–239.
- Musyafa, R. A. Z., Ikhsan, M. F., Isti'annah, L., & Fachry, A. M. (2025). Analisis Persepsi Pengunjung terhadap Atmosfer Gerai Mixue: Pendekatan SOR melalui Observasi Partisipatif. *Business, Economics, and Management Studies*, 1(1), 48–58.
- Negara, S. (2003). Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. In *Jakarta (ID). Sekneg*.
- Seymour, R. G. (2012). Drawing and verifying conclusions. *Handbook of Research Methods on Social Entrepreneurship*, 218, 228.
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif &*

Cite this article as :

Naida, N. . Optimalisasi Implementasi SIPD Melalui Klinik Akuntansi dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: Pendekatan Kualitatif Di Kabupaten Tojo Una-Una. *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture*, 3(2), 100–111. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v3i2.396>

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

kualitatif. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

- Silvia, L., Yuni, S., & Asi, O. Y. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Aksesibilitas Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 33–46.
- Suprpti Widasih. (2025). Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Konteks Administrasi Publik. *Governance Dan Administrasi Publik: Teori, Dinamika Dan Inovasi*, 32.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).
- Swasanany, W. T. (2019). Akuntabilitas Kinerja. In *Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.
- Tallane, Y. Y., & Kusuma, I. W. (2020). Analisis Indikasi Praktik Manajemen Laba (Studi Kualitatif Dengan Menggunakan Pendekatan in-Depth Interview Pada Auditor). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(1).
- Yanuarisa, Y., & Irianto, G. (2014). Fenomenologi Transendental Dalam Transparansi dan Akuntabilitas Performance Based Budgeting. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(2), 208–221.